

Jurnal Terbitan Berkala
Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

P-ISSN 2541-2353
E-ISSN 2541-531X

BINA HUKUM LINGKUNGAN

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016





BINA HUKUM LINGKUNGAN
Jurnal Terbitan Berkala Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
P-ISSN: 2541-2353, E-ISSN 2541-531X

Bina Hukum Lingkungan adalah jurnal ilmiah yang terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Mei dan Oktober yang di terbitkan oleh Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI). Artikel yang dimuat pada jurnal Bina Hukum Lingkungan akan di publikasikan dalam bentuk cetak dan e-jurnal dalam rangka menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang hukum lingkungan dalam negeri maupun luar negeri.



BINA HUKUM LINGKUNGAN
Jurnal Terbitan Berkala Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
P-ISSN: 2541-2353, E-ISSN: 2541-531X

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

Ida Nurlinda

Pemimpin Redaksi:

Maret Priyanta

Editor Utama:

Nadia Astriani

Editor Ahli:

M Daud Silalahi (Universitas Padjadjaran)

Takdir Rahmadi (Universitas Andalas)

Harry Supriyono (Universitas Gajah Mada)

Editor Pelaksana:

Yulinda Adharani

Achmad Billy Zulqiyami

Staf Administrasi:

Hanna Riyanda

Agus Sumpena

Redaksi Bina Hukum Lingkungan:
Jl. Imam Bonjol No.21 - Bandung 40132. Telp. 082115326539 *Email.* redaksi.bhl@gmail.com
Website. www.bhl-jurnal.or.id



BINA HUKUM LINGKUNGAN

Jurnal Terbitan Berkala Pembina Hukum Lingkungan Indonesia

P-ISSN: 2541-2353, E-ISSN: 2541-531X

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 Halaman 1-133

DAFTAR ISI

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Ida Nurlinda	1-9
Mediasi Pilihan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Marhaeni Ria Siombo	10-18
Dinamika Negosiasi dan Membangun Kepercayaan Pasca Penutupan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru Arman Anwar	19-35
Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) Andri G. Wibisana	36-58
Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Melalui <i>Community Development</i> Purwowibowo, Nur Dyah Gianawati	59-74
Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan Nilma Suryani	75-83
Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku Victor Juzuf Sedubun, Muhammad Irham	84-98
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Aditia Syaprih	99-113
Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Yanti Fristikawati	114-124
Aspek Hukum Administrasi Kependudukan Dihubungkan Dengan Kepemilikan Tanah Secara <i>Absentee</i> Mulyani Djakaria	125-133



KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN HUTAN MANGROVE MELALUI COMMUNITY DEVELOPMENT

MANGROVE FOREST CONSERVATION THROUGH LOCAL WISDOM BASED ON COMMUNITY DEVELOPMENT

Purwowibowo,* Nur Dyah Gianawati**

Abstrak

Kajian kearifan lokal melalui pengembangan komunitas (*comdev*) untuk menjaga kelestarian lingkungan telah lama dilakukan. Namun, penelitian sejenis untuk perlindungan hutan mangrove jarang dilakukan. Artikel ini memfokuskan pada pengembangan komunitas (*comdev*) berbasis kearifan lokal dengan proses *bottom-up* oleh masyarakat desa pesisir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pengembangan komunitas secara *bottom-up* bertujuan untuk menjelaskan bahwa seluruh aktifitas yang digagas atau dilakukan, dikontrol oleh masyarakat setempat dengan pemimpin yang informal dan para anggotanya. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan tanpa melibatkan atau difasilitasi oleh pihak eksternal seperti LSM atau pemerintah. Melalui kearifan lokal yakni pengetahuan masyarakat, kebudayaan, sumberdaya, keterampilan dan proses-proses, serta pengembangan komunitas masyarakat lokal yang terus menerus dilakukan, sehingga pada akhirnya menghasilkan perlindungan hutan mangrove. Namun, kerusakan hutan mangrove yang diakibatkan oleh perbuatan masyarakat lokal ataupun orang-orang yang berasal dari luar daerah tersebut sehingga kerusakan hutan mangrove tidak dapat dielakan lagi. Sejauh ini, keadaan tersebut dapat diatasi melalui regulasi yang memperhatikan kearifan lokal serta dengan menerapkan prinsip *win-win solution* terhadap komunitas terkait. Perlindungan hutan mangrove di daerah garis pantai dapat menjadi sabuk hijau dan media untuk berbagai jenis dari pemulihan sumberdaya alam. Ketersediaan sumberdaya alam dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bentuk keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Hutan Mangrove; Pengembangan Komunitas.

Abstract

Study of local wisdom through Community Development (*Comdev*) to maintain environmental sustainability has long been undertaken. However, research of similar kind for mangrove forest conservation is rarely carried out. This article focuses on local wisdom-based *Comdev* with *bottom-up* process conducted by coastal village community in Rembang regency, Central Java. *Bottom-up Comdev* is meant to clarify that the entire activities were merely initiated, conducted and controlled by the local community with the informal leader and members. Thus, the activities have been carried out without

* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Kampus Universitas Jember, Jl. Kalimantan, No. 37, 68121, e-mail: poerwowibowo@yahoo.co.id.

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Kampus Universitas Jember, Jl. Kalimantan, No. 37, 68121, e-mail: nurdyahgianawati@yahoo.co.id.

the involvement or facilitation of external parties like NGO or government. Through local wisdom namely local background knowledge, local culture, local resources, local skills and local process, the ongoing Comdev has long been conducted and mangrove forest conservation eventually became a reality. Nevertheless, mangrove forest destruction caused by local people or outsiders inevitably takes place. Yet, this circumstance can be overcome through regulation issued with local wisdom through 'win-win solution' with related community. Mangrove forest conservation in shoreline region can be the greenbelt and media for various types of natural resources recovery. The natural resource availability can empower human welfare in the form of regular employment and income.

Keywords: Local Wisdom; Mangrove forest; Community Development.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya sebuah komunitas untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pelestarian dan pemulihan hutan mangrove dengan cara pengembangan komunitas. Konservasi hutan mangrove tersebut dapat menghasilkan sumber daya lainnya seperti ekologi, ekonomi, dan sosial guna peningkatan kualitas hidup setiap anggotanya. Inisiatif gerakan ini berasal dari pemimpin informal yang diikuti oleh anggota komunitas secara partisipatif. Dengan demikian, gerakan ini bersifat *bottom-up* dan disebut sebagai pengembangan komunitas (*community development*).¹

Gerakan ini muncul karena kondisi aktual hutan mangrove yang terus mengalami degradasi. Hal tersebut mempengaruhi kerusakan unsur lingkungan lainnya, padahal sumber daya alam sangat dibutuhkan bagi

kehidupan komunitas pesisir. Agar gerakan ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan oleh lembaga sosial yang memiliki pengetahuan lokal masyarakat setempat.²

Secara umum, kondisi hutan mangrove di Indonesia sangat memprihatinkan. Kerusakan terjadi dari tahun ke tahun dan terus meningkat. Fakta ini mempertegas keadaan bahwa luas hutan mangrove di Indonesia semakin berkurang. Berdasarkan survei Kementerian Kehutanan tahun 2006 luas hutan mangrove Indonesia adalah 7,7 juta hektar. Berdasarkan survei lanjutan pada 2010, luas hutan mangrove Indonesia tersisa sekitar 3 juta hektar.

Sedangkan menurut data statistik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, degradasi hutan mangrove mencapai 70 %, yakni 4,826 juta ha dari total luas hutan mangrove Indonesia seluas 6,798 juta ha.³

¹ Lihat, David Brokensha and Peter Hodge, *Community Development, an Interpretation*, Chandler Publishing Company, Chicago, 1969, hlm. 35.; Herbert J. Rubin and Irene S. Rubin, *Community Organizing and Development*, Allyn & Bacon, Massachusetts, 2001, hlm. 3.; Susan Kenny, *Developing Communities, For The Future*, Nelson Thomson, Australia, 2007, hlm. 10.

² Yunita T. Winarto dan Ezra M. Choesin, "Pengayaan Pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial: Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Kemitraan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Ed. 64 Tahun 2001, hlm. 91-106. <http://anthropology.fisip.ui.ac.id/httpdocs/jurnal/2001/64/full/09ytw64.pdf>. (diakses 24 Mei 2013).; Jim Iff dan Frank Tesoriero, *Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 250-262.

³ Weka Mahardi, 'Lesson Learned from The Programme "Let's Plant Mangrove" Case Study from Villages in Banten and Central Java Province Indonesia' In Sharing Lesson on Mangrove Restoration. Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium (Mamallapuram, India 30-31 Agustus, 2012), hlm. 105-114. <http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Call-for-Action-and-Proceedings-from-2012-Colloquium-Mamallapuram-India.pdf> (diakses 28 Juli 2013).

Hal ini ini diperburuk lagi dengan terus berlangsungnya pembangunan di wilayah pesisir, maka dipastikan luas hutan mangrove Indonesia semakin berkurang.

Hutan mangrove di wilayah pesisir utara Pulau Jawa memiliki tingkat kerusakan sangat parah, apalagi saat ini kegiatan reklamasi hutan mangrove terus digalakan dengan mengalih fungsikan kawasan hutan mangrove itu menjadi tambak, area industri, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah.⁴ Padahal dalam faktanya, hutan mangrove bisa menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Dengan demikian, pemulihan dan pelestarian hutan mangrove sudah seharusnya lebih digalakan.

Selama ini upaya untuk rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove memang sudah dilakukan baik melalui program pemerintah (secara *top-down*) maupun pihak swasta. Rehabilitasi hutan mangrove juga bisa melalui komunitas yang ada berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*), misalnya komunitas desa Pasar Banggi di wilayah Kabupaten Rembang. Dengan kesadaran dari seluruh komponen komunitas (pemimpin dan anggota), mereka melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove secara mandiri.

Di sisi lain banyak juga komunitas desa

pesisir lainnya yang justru melakukan perusakan.⁵ Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gerakan pengembangan komunitas di wilayah desa pesisir untuk melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengembangan komunitas untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang gerakan kesadaran oleh komunitas tersebut dalam melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove. Selain itu, penelitian ini mengkaji dan memahami bagaimana awal mula pengembangan komunitas dan seluruh prosesnya sehingga dapat mewujudkan hutan mangrove dan menjaga kelestariannya.

Pada sekitar tahun 1980-an, pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan sekarang pendekatannya berbasis pada manusia (*peoplecentered development*).⁶ Pendekatan pembangunan model ini lebih mendasarkan pada proses dari bawah (*bottom-up*)⁷ daripada model pembangunan yang dirancang dari atas (*top-down*).

Pembangunan melalui model *bottom-up* sebenarnya merupakan reaksi dari pendekatan pembangunan berbasis *top-*

⁴ Kusuma Winarno dan dan Ahmad Dwi Setyawan, "Penyudetan Sungai Citanduy, Buah Simalakama Konservasi Ekosistem Mangrove Segara Anakan", *Jurnal Biodiversitas* Vol. 4, No. 1 Tahun 2006, hlm. 63-72.; <http://eprints.uns.ac.id/845/> (diakses 24 Mei 2013).; Sukristjoro Sukardjo, *Indonesian Mangrove: Critical Challenges and Strategies for Their Sustainable Management After the 2004 Indian Ocean tsunami*, In Sharing Lesson on Mangrove Restoration. Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium (Mamallapuram, India, 30-31 Agustus, 2012), hlm. 39-50. <http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Call-for-Action-and-Proceedings-from-2012-Colloquium-Mamallapuram-India.pdf> (diakses 28 Juli 2013).

⁵ Ahmad Dwi Setyawan. dan Kusumo Winarno, "Permasalahan Konservasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah", *Jurnal Biodiversitas* Vol. 7, No. 2 Tahun 2006, hlm. 59-163. <http://eprints.uns.ac.id/845/> (diakses 15 Mei 2013).

⁶ David C. Korten, "Third Generation NGO Strategies: A Key to People-Centered Development." *World Development Pergamon Journals* 15 (supplement, 1987), hlm. 145-159. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X87901537> (diakses: 16 Nopember 2014).

⁷ Ife, Jim dan Frank Tesoriero. *Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 250.

down. Model dari atas (*top-down*) yang awalnya diharapkan bisa menghasilkan pembangunan yang mengalir ke bawah (*trickle-down effects*) ternyata menimbulkan banyak distorsi di berbagai bidang. Pembangunan dari bawah melalui pengembangan komunitas (*community development*) yang berbasis konteks dan sumber daya lokal akhirnya menjadi alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan komunitas yang berbasis *bottom-up* adalah strategi pembangunan manusia yang menekankan pada aspek lokalitas berhubungan dengan kreativitas, pengetahuan, kebudayaan, sumber daya, keterampilan, proses dan pandangan lokal.⁸ Oleh karena itu, kata kunci dari pengembangan komunitas adalah partisipasi semua anggota dalam seluruh proses kegiatan; dari anggota komunitas, oleh komunitas, dan untuk komunitas itu sendiri. Konsekuensinya, jika partisipasi anggota⁹ komunitas rendah berarti proses pengembangan komunitas tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Pengembangan komunitas dari bawah berarti dimulai dari komunitas terbawah; diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan: identifikasi masalah, kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil pembangunan. Dengan demikian, program pengembangan komunitas yang dirancang oleh pihak luar tidak termasuk dalam konsep pengembangan komunitas secara *bottom-up*.¹⁰

Pengembangan komunitas yang diinisiasi

oleh komunitas dan partisipasi aktif seluruh anggotanya dalam rangka untuk peningkatan derajat kehidupan seluruh anggota komunitas tersebut. Inti dari pengembangan komunitas yang bersifat *bottom-up* ini ditekankan pada proses, tugas dan tanggung jawab serta visi untuk memberdayakan anggota komunitas. Seluruh proses tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Hasil akhir bukanlah target yang ingin dicapai.¹¹

Dengan demikian, tujuan dari program pengembangan komunitas ini adalah agar komunitas itu sendiri mampu mengendalikan semua proses secara efektif dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengembangkan dan melakukan investasi sosial bagi kehidupan.¹²

Rehabilitasi sertakonservasi terhadap hutan mangrove melalui program pengembangan komunitas sudah banyak dilakukan di Indonesia terutama setelah tsunami di Aceh tahun 2004 lalu. Banyak kasus menunjukkan bahwa hutan mangrove mampu menahan gelombang yang amat besar. Kenyataan ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah untuk memulihkan dan melestarikan hutan mangrove. Secara umum di dunia, strategi yang dicanangkan untuk merehabilitasi dan mengkonservasi hutan mangrove adalah melalui program nasional dan internasional dengan membentuk suatu lembaga, misalnya: 'Mangrove Untuk Masa Depan' (*Mangrove for the Future* atau MFF). Contoh lain, di India menggabungkan program pemerintah dengan lembaga sosial dengan nama "Joint Forest Management Committies (JFMCs)"

⁸ James Midgley, *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, Sage Publication, London, 1995, hlm. 1-36.

⁹ Ife dan Tesoriero, *Op.cit.*, hlm. 251.

¹⁰ Sutomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 65-66.

¹¹ Kenny, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹² James Midgley and Amy Conley, *Social Work and Social Development, Theories and Skills for Development Social Work*, Oxford University Press, England, 2010, hlm. 31-54.

dengan "Forest Protection Communitities and Ecodevelopment Communitities".¹³

Di Indonesia strategi nasional rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove diberi nama: 'Indonesia's National Strategy for Mangrove Ecosystem Management'.¹⁴ Bahkan, sebuah desa di Provinsi Banten mencanangkan program dengan slogan "Let's Plant Mangrove" untuk menandai gerakan menyadarkan masyarakat pesisir guna menanam pohon mangrove.¹⁵

Dengan fakta ini, partisipasi anggota komunitas dalam program rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir adalah merupakan faktor penting.¹⁶ Pemulihan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh komunitas di sekitar pesisir itu mengangkat kearifan lokal. Berdasarkan pengetahuan lokal dan pranata sosial lokal, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dikelola dengan basis kemitraan lokal (*local partnership*).¹⁷

Peran lembaga sosial sangat penting sebagai kearifan lokal karena dapat memfasilitasi komunitas saat melakukan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan untuk merehabilitasi lingkungan.¹⁸ Lembaga adat

lokal juga berperan dalam pembangunan wilayah pedesaan, khususnya masyarakat pesisir berfungsi untuk membangun modal sosial: nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan nilai lingkungan, yang merupakan kekayaan kearifan lokal.¹⁹

Dengan menggunakan modal sosial berbasis kearifan lokal, komunitas pesisir dapat merehabilitasi hutan mangrove dengan sistem kepemimpinan lokal yang efektif. Dengan begitu, konflik kepentingan yang terjadi di antara anggota komunitas dapat diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh pemimpin lokal. Selain itu, NGO juga berperan dalam menjembatani mediasi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan komunitas mengenai hak-hak pengelolaan hutan mangrove yang ada, sebagai contoh yaitu partisipasi aktif komunitas pantai Pattani Thailand yang memberikan hak kepemilikan proyek rehabilitasi kepada masyarakat lokal. Dengan model demikian masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan memperkuat organisasi lokal, membangun kesadaran kepemilikan bersama, dan melakukan kegiatan rehabilitasi secara partisipatif.²⁰

¹³ Pradeep Vyes and K Sengupta, *Mangrove Conservation and Restoration in Indian Sun-derbans*. p. 91 -104. In 'Sharing Lesson on Mangrove Restoration. Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium (Mamallapuram, India, 30 - 31 Agustus 2012), 91-104. <http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Call-for-Action-and-Proceedings-from-2012-Colloquium-Mamallapuram-India.pdf> (diakses 28 Juli 2013).

¹⁴ Sukardjo, *Op.cit.*, 41.

¹⁵ Mahardi, *Op.cit.*, 106.

¹⁶ Sukardjo, *Op.cit.*, 40.

¹⁷ Winarto, 95. <http://anthropology.fisip.ui.ac.id/httpdocs/jurnal/2001/64/full/09ytw64.pdf> (di-akses 24 Mei 2013).

¹⁸ Triyono dan Ahmad Arif, *Modal sosial sebagai Mainstream Pengembangan Masyarakat Pesisir: Sebuah Pendekatan Sosial Untuk Mendukung Pembangunan Lokal Tipologi Masyarakat Pesisir*. Prosiding Lokakarya Nasional Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Potensi Konflik antar Daerah. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 30 Agustus, 2003, hlm. 416-424.

¹⁹ Sudtongkong, Chanyut and Edward L. Webb. "Outcomes of State - vs. Community-Based Mangrove Management in Southern Thailand", *Ecology and Society Journal* Vol. 13, No. 2 Tahun 2008, hlm. 32. <http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art27>.

²⁰ P.L.A. Erfemeijer and A. Bualuang, *Participation of Local Communities in Mangrove Forest, Rehabilitation in Pattani Bay, Thailand. Learning from Successes and Failures'* Proceeding of a Work-shop Held at the 2nd International

Contoh lain, di beberapa Negara Afrika yang menerapkan strategi *'win-win scenario'* dalam melakukan program rehabilitasi hutan mangrove, yaitu strategi konservasi yang saling menguntungkan antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi seluruh anggota komunitas dengan cara seperti: menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan lokal, menghargai sumber daya lokal, menghargai ketrampilan lokal, menghargai proses lokal, dan bekerja dengan solidaritas.²¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan komunitas secara *bottom-up* oleh masyarakat pesisir dalam melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove. Penelitian kualitatif sangat sesuai dilakukan untuk proses pengembangan komunitas, sebagai fenomena sosial yang telah berlangsung lama.

Karena kegiatan pengembangan komunitas tersebut berlangsung sejak tahun 1964, sementara data yang dibutuhkan tersimpan lama, maka pendekatan kualitatiflah yang paling sesuai. Dengan metode ini peneliti dapat memahami keseluruhan proses pengembangan komunitas mulai dari *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes*-nya.

Peneliti melakukan verifikasi atau triangulasi, baik terhadap sumber informasi maupun metode pengumpulan datanya dengan menggunakan rancangan studi kasus, yakni kasus gerakan komunitas kecil yang melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Penelitian juga melibatkan informan yang berasal dari anggota. Secara khusus, informan

adalah orang yang menjadi pelaku utama dalam menginisiasi, menggerakkan dan mengorganisir partisipasi anggota komunitas.

Untuk itu, informan kunci dipilih dan ditentukan terlebih dahulu secara sengaja (*purposive*), dengan cara menghubungi Kepala Desa dengan memberikan kriteria yang diinginkan. Secara keseluruhan, informan terdiri dari 6 orang, yakni seorang informan kunci dan 5 orang informan dari anggota komunitas yang berpartisipasi aktif.

Proses pengumpulan informasi dari informan kunci dan informan lainnya dikumpulkan sejak peneliti berada di tengah-tengah komunitas sampai berakhirnya penelitian. Selama berada di lapangan peneliti mengobservasi komunitas terkait semua kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut berhubungan dengan proses pemulihan dan pelestarian hutan mangrove. Observasi juga dilakukan terhadap kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan komunitas.

Selama observasi dilakukan, dokumentasi (pemotretan) dan wawancara dilakukan. Wawancara tersebut dilaksanakan secara bebas tanpa kuesioner tapi mengacu pada pedoman wawancara penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci dan informan lain di rumahnya atau di tempat lain yang telah disetujui.

Hasil wawancara dicatat dan terus disempurnakan selama proses penelitian. Catatan juga berupa catatan lapangan, pemikiran, perasaan, pengalaman, dan persepsi peneliti selama proses penelitian berlangsung. Pengumpulan informasi melalui

Conference on Wetlands and Development, (Dakar, Sinegal, No-vement, 1998), 27-36. <https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2002-012.pdf> (diakses 28 Juni 2013).

²¹ Ife dan Tesoriero, Op.cit., hlm. 241.

wawancara dihentikan setelah dianggap informasinya “jenuh” yang ditandai tidak diketemukannya informasi baru dari informan terakhir tentang pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pengolahan dan analisis informasinya dilakukan secara serempak. Sepanjang proses pengumpulan informasi berlangsung di tempat penelitian, peneliti melakukan proses analisis, mulai pengumpulan informasi awal sampai berakhirnya penelitian. Informasi yang terkumpul diindeks dan diberi kode tertentu baik dari peristiwa-peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi saat berlangsungnya penelitian dan/atau peristiwa sebelumnya dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori-kategori. Selama analisis informasi dilakukan, informasi disusun secara kategoris dan kronologis, diperiksa berulang kali dan dilakukan koding secara terus menerus.

Penelitian ini untuk memahami proses pengembangan komunitas, maka runtutan dari peristiwa yang menjadi gagasan utama dicatat termasuk sebab kemunculannya. Semua informasi ditranskrip kata demi kata dan terus direview secara terus menerus agar informasinya dapat dipahami secara komprehensif.

Lokasi penelitian ditentukan di Komunitas Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena terdapat hutan mangrove yang merupakan hasil dari pengembangan komunitas dan sudah menjadi contoh konservasi oleh komunitas setempat.

PEMBAHASAN

Desa Pasar Banggi

Secara umum wilayah Desa Pasar Banggi tidak berbeda dengan wilayah lain di Kabupaten Rembang, terutama wilayah

pedesaan pesisir. Bidang pekerjaan yang ada adalah nelayan kecil, petambak, buruh tambak, petani sawah, petani garam, buruh tani, dan berbagai usaha ekonomi subsisten lainnya yang merupakan ciri kehidupan alam pedesaan pesisir. Secara khusus, Desa Pasar Banggi sangat berbeda dengan desa lainnya, karena memiliki sabuk hijau (*greenbelt*) berupa hutan mangrove yang membentang sejauh 3,5 km dan memiliki ketebalan hutan antara 65-150 m. Hutan mangrove tersebut merupakan hasil kegiatan pengembangan komunitas (*comdev*) yang dilakukan oleh komunitas desa setempat.

Hutan mangrove di desa Pasar Banggi menjadi kebanggaan komunitas desa dan masyarakat Rembang pada umumnya. Keberadaan hutan mangrove inilah yang menjadikan desa ini dikenal oleh masyarakat luas dan mancanegara termasuk kalangan akademisi (mahasiswa, dosen, peneliti).

Awal Mula Pemulihan dan Pelestarian Hutan Mangrove

Gagasan melakukan kegiatan penanaman, pemulihan, dan pelestarian hutan mangrove murni datang dari komunitas masyarakat yang diinisiasi oleh seseorang yang kemudian menjadi pemimpin informal komunitas tersebut. Pemimpin ini bersama ang-gota komunitas lainnya, yang tambaknya mengalami kerusakan, melakukan pemulihan tanggul tambak dengan cara menanami pohon mangrove.

Sebelumnya, apabila banyak tanggul tambak rusak, tak ada yang tergerak untuk memperbaikinya. Gagasan untuk melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove murni inisiatif dari komunitas setempat; dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri. Inilah yang disebut dengan *comdev* berbasis kearifan lokal.

Pengembangan komunitas dalam hal pelestarian hutan mangrove tersebut telah berjalan lebih 50 (lima puluh) tahun, dimulai oleh H. Suyadi pada tahun 1964 dan kemudian diikuti partisipasi aktif anggota komunitas, dan terus berlangsung sampai sekarang.

Sebelum tahun 1964, tambak-tambak yang dimiliki oleh anggota komunitas tidak bisa digunakan sebagai tempat budidaya. Hal ini karena banyaknya air laut yang masuk ke dalam tambak akibat abrasi air laut. Pada waktu itu, tanggul tambak yang rusak diperbaiki oleh para pemilik tambak tapi tetap tidak mampu menahan gelombang air laut. Tanggul yang dibuat dari tiang pancang bambu, batu dan semen itu tetap hancur tiap kali datang musim angin dan gelombang besar.

H. Suyadi adalah orang yang pertama kali mengetahui manfaat pohon mangrove untuk melindungi tanggul dari terjangan gelombang. Kisahnya, ia melihat sebuah tanggul tidak rusak diterjang gelombang karena pohon mangrove itu sebagai pelindungnya. Dari situlah idenya muncul untuk menanam pohon mangrove agar tanggul tambaknya terlindungi secara permanen. Awalnya, semua ia kerjakan secara mandiri namun mengalami kegagalan ia belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Kegagalannya memperkuat mitos bahwa pohon mangrove tidak bisa ditanam oleh manusia.

Kegagalan menanam pohon mangrove itu, meskipun dipengaruhi mitos, tak menyurutkan niat H. Suyadi untuk tetap menanam pohon mangrove. Maka, ia terus melanjutkan penanaman pohon mangrove itu di tahun berikutnya, tetap secara mandiri. Kegagalan di tahun pertama itu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga, sehingga dia berusaha mempelajari sendiri pola tanam dan berbagai hal berkaitan

dengan pohon mangrove. Hasilnya, di tahun kedua ia berhasil, sehingga penanaman terus dilanjutkan di tahun berikutnya sehingga tanaman mangrovenya semakin bertambah banyak.

Karena keberhasilan tersebut, H. Suyadi mengajak para tetangganya yang memiliki tambak untuk melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove sebagaimana yang dilakukannya. Awalnya banyak yang menolaknya bahkan mengolok-olok, namun H. Suyadi tak menggubrisnya dan tak pernah menganggapnya sebagai hambatan, justru dianggapnya sebagai tantangan. Oleh karena itu, seringkali dia memberi pemahaman pada pemilik tambak yang tanggulnya berbatasan langsung dengan laut agar tanggul mereka masing-masing segera ditanami pohon mangrove. Usahnya tidak sia-sia, lambat laun tetangganya yang memiliki tambak mengikuti apa yang dilakukannya karena mereka melihat hasil pohon mangrove tumbuh di tanggul tambak para tetangganya itu. Akhirnya, gerakan penanaman pohon mangrove serempak terjadi, baik secara sendiri maupun bersama.

Bila penanaman dilakukan di tanah negara maka hal tersebut dilakukan secara bersama. Berkat kebersamaan tersebut akhirnya hutan mangrove dapat diwujudkan dan sekarang menjadi 'ikon' desa tersebut. Selain itu, hutan mangrove dapat menjadi pelindung alami dan permanen sehingga tambak-tambak yang dimiliki anggota komunitas dapat dipergunakan sebagai tempat budidaya.

Gerakan komunitas di dalam pemulihan dan pelestarian hutan mangrove juga didukung oleh keberadaan lembaga lokal yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif komunitas sendiri. Lembaga lokal tersebut bernama 'Kelompok Tani Perikanan Sidodadi Maju' yang dibentuk dengan tujuan mengikat para anggota kelompok dan mengakselerasi

kegiatan pengembangan komunitas.

Tumbuhnya Partisipasi Anggota Komunitas Dalam Proses Comdev

Pemulihan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Pasar Banggi tak lepas dari partisipasi aktif anggota komunitas setempat. Anggota komunitas mendukung upaya pemimpin informalnya dalam mewujudkan hutan mangrove sebagai pelindung alami tambak. Partisipasi anggota komunitas tidak muncul dan terwujud dengan mudah. Semuanya bergantung pada usaha yang tak kenal lelah dari sang pemimpin informal dalam mengkomunikasikan pentingnya hutan mangrove sebagai pelindung alami tambak pada semua anggota komunitas.

Pada kenyataannya, baru di tahun kelima penanaman, yakni tahun 1968, anggota komunitas mulai berpartisipasi di dalam kegiatan penanaman pohon mangrove. Pada saat itu anggota komunitas yang terlibat penanaman pohon mangrove mencapai 5 orang. Penanaman pohon mangrove secara bersama tidak hanya dilakukan pada tanggul tambak orang-orang itu tetapi juga di kawasan tanah negara di sekitar tambak mereka.

Pada tahun 1970 dan 1971 keterlibatan anggota komunitas terus bertambah. Hal ini karena penanaman pohon mangrove sudah menampakkan keberhasilan, pohon mangrove mulai dapat melindungi tanggul tambak. Keberhasilan penanaman pohon mangrove mampu memikat anggota komunitas yang belum berpartisipasi.

Tahun 1972 merupakan awal terbentuknya kelompok tani tambak yang melakukan penanaman pohon mangrove. Jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan ini juga mengalami kenaikan yakni sebanyak 11 orang. Berdasarkan kesepakatan, dibentuklah kelompok berbasis kearifan lokal yang

dinamai “Kelompok Tani Perikanan Sidodadi Maju”. Terbentuknya kelompok ini adalah bentuk kesadaran anggota komunitas tentang pentingnya kegiatan bersama di dalam melakukan penanaman pohon mangrove. Dengan kelompok ini para petani tambak semakin intensif di dalam melakukan kegiatan penanaman bersama. Selain itu, kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dilakukan bersama-sama pula.

Pada tahun 1973 sampai tahun 1980 kegiatan penanaman pohon mangrove yang dilakukan oleh anggota kelompok tani semakin menjadi kebutuhan mereka. Saat itu, bibit-bibit yang ditanam pada tahun sebelumnya sudah mulai besar. Pohon yang sudah tumbuh tersebut memberikan keyakinan yang besar dan nyata bahwa pohon mangrove dapat menjadi pelindung alami tambak mereka. Oleh karena itu, anggota kelompok bertekad untuk menanami pohon mangrove di seluruh wilayah pantai desanya dan menjadikan kawasan pesisirnya hutan mangrove.

Pada tahun 1987 jumlah anggota kelompok tani yang peduli pada penanaman mangrove bertambah menjadi 18 orang. Bertambahnya anggota kelompok tani ini menambah sumber daya manusia yang ada sehingga kegiatan penanaman pohon mangrove semakin luas dan tidak hanya di lokasi pantai Desa Pasar Banggi, melainkan merambah ke desa lain di kawasan Kecamatan Lasem.

Pada tahun 1990 jumlah kelompok tani peduli mangrove sebanyak 28 orang. Dengan jumlah sebesar itu, kelompok ini mulai banyak dikenal masyarakat luas dan pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi, termasuk juga perguruan tinggi. Dengan begitu, kegiatan kelompok tani yang peduli mangrove akhirnya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rembang berupa pengadaan bibit dan biaya operasional penanaman. Dukungan pembibitan berasal dari berbagai instansi berupa polybek sebagai media sehingga hasil pembibitan lebih baik dan berkualitas. Selain itu, jumlah pembibitan semakin banyak dan sisa dari bibit yang ditanam dapat dijual guna menambah penghasilan kelompok.

Hal positif lainnya adalah pemerintah daerah lain dapat memesan bibit mangrove dari kelompok tani tersebut. Bukan itu saja, di tahun berikutnya banyak instansi pemerintah dan lembaga perguruan tinggi juga ikut berpartisipasi mendukung kegiatan penanaman pohon mangrove yang dilakukan Kelompok Tani Sidodadi Maju ini.

Sampai tahun 2012, jumlah anggota kelompok menjadi 57 orang dan kegiatan para anggota komunitas terus berlanjut. Namun, jumlah kegiatan penanaman sudah mulai berkurang. Hal ini karena wilayah pesisir Desa Pasar Banggi telah tertanami semua dengan pohon mangrove. Kegiatan anggota komunitas diintensifkan pada pemeliharaan dan penyulaman tanaman mangrove yang mati.

Nilai Sosial-Budaya Komunitas Dalam Proses Comdev

Keberhasilan pemimpin informal bersama anggota komunitas dalam mewujudkan hutan mangrove di Desa Pasar Banggi dilandasi revitalisasi nilai sosial-budaya setempat. Hal ini berdasarkan ungkapan/motto yang mereka pegang teguh: "hutan mangrove hilang, lahan dan tambak gersang, hidup masyarakat meradang".²² Norma sosial-

budaya ini menjadi sumber energi bagi semua yang terkait/pemimpin informal dan anggota komunitas untuk melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove.

Secara sosial-budaya hutan mangrove memang harus ada di komunitas Desa Pasar Banggi. Menurut mereka, tanpa konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir, tambak akan menjadi gersang. Tambak yang gersang tidak bisa digunakan untuk budidaya. Dengan begitu, banyak anggota komunitas yang menganggur dan kehidupannya menjadi lebih miskin.

Ungkapan yang mereka pegang teguh adalah 'hutan mangrove-ku tumbuh, desaku teduh'.²³ Maksudnya, hutan mangrove tidak hanya memberikan perlindungan terhadap tambak tetapi juga menjadi peneduh lingkungan desa.

Sementara ungkapan lainnya: "tambak subur, masyarakat hidup makmur".²⁴ Ini menunjukkan ketergantungan komunitas pesisir dengan keberadaan hutan mangrove dan tambak. Kesuburan hutan mangrove juga merupakan wujud dari kesuburan tambak, begitu pula kesuburan hutan mangrove berarti juga kemakmuran anggota komunitas.

Seluruh komunitas mempunyai kewajiban untuk melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove agar tambak yang mereka miliki menjadi subur dan pemiliknya menjadi makmur.

Ada juga motto yang tidak hanya memiliki nilai sosial-budaya tetapi juga religius, seperti: "Pohon-pohon mangrove selalu berdzikir dengan bergoyang setiap diterpa angin, selain berdzikir kepada dirinya

²² Transkrip hasil wawancara mendalam dan berulang dengan H. Suyadi, sebagai pemimpin in-formal dalam proses comdev (April-Oktober, 2013).

²³ Transkrip hasil wawancara dengan H. Suyadi (April-Oktober, 2013).

²⁴ Transkrip hasil wawancara (April-Oktober, 2013).

sendiri juga mendo'akan yang menanam dan melestarikannya". Mereka yakin bahwa menanam mangrove adalah perbuatan baik, dan mangrove-pun mendo'akan yang menanamnya. Nilai agama tersebut diimplementasikan oleh pemimpin informal dan anggota komunitas.²⁵

Comdev Dalam Pemulihan dan Pelestarian Hutan Mangrove

Kegiatan komunitas desa Pasar Banggi dalam melakukan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove disebut sebagai gerakan sosial untuk penguatan *civil society*. Tindakan pemimpin informal bersama anggota komunitas tersebut dalam gerakan pengembangan komunitas dilandasi pada perspektif ekologis dan keadilan sosial.²⁷

Model pengembangan komunitas seperti ini disebut sebagai 'comdev berbasis kearifan lokal' atau comdev *bottom-up*. Hal ini karena semua proses kegiatan yang dilakukan seluruh komunitas dirancang, diimplementasikan, dievaluasi oleh mereka sendiri.²⁸ Comdev ini berbasis local wisdom, yakni dilandasi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, sumber daya lokal, ketrampilan lokal, dan dilakukan melalui proses lokal.²⁹

Landasan kearifan lokal meliputi: pertama, pengembangan komunitas berdasarkan 'pengetahuan lokal'. Seperti, komunitas Desa Pasar Banggi di Kabupaten Rembang yang mengatasi masalah kerusakan tanggul tambak dengan menanam dan melestarikan pohon mangrove. Hal ini mengindikasikan bahwa

komunitas adalah yang paling tahu masalah yang dihadapi sekaligus cara yang harus dilakukan sebagai upaya perbaikannya.³⁰ Tata cara menanam pohon mangrove mereka pelajari sendiri. Meski awalnya mengalami kegagalan, mereka terus belajar dan akhirnya mereka memiliki pengetahuan tentang tata cara menanam pohon mangrove yang baik dan benar. Pengetahuan itu tidak mereka peroleh dari pelatihan atau buku.

Kedua, model pengembangan komunitas berlandaskan 'kebudayaan lokal'. Meskipun tidak semua nilai lokal kebudayaan mereka baik, namun pengembangan komunitas di Desa Pasar Banggi didasarkan pada nilai-nilai lokal yang baik dan bermanfaat. Misalnya, mitos bahwa 'pohon mangrove yang ditanam selalu berdzikir setiap diterpa angin dan selalu berdo'a untuk kebaikan penanamnya', merupakan nilai budaya lokalitas yang sangat baik.

Ketiga, model pengembangan komunitas berlandaskan 'sumber daya lokal'. Komunitas di Desa Pasar Banggi dalam melakukan comdev-nya bertujuan untuk memulihkan sumber daya yang dimiliki komunitas yaitu tambak. Komunitas pesisir sangat tergantung kepada sumber daya tambak. Selain itu, komunitas pesisir juga mengandalkan sumber daya alam laut dan pesisir, sehingga kegiatan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove juga merupakan upaya pemulihan dan pelestarian sumber daya alam sebagai aset di lingkungan komunitas. Sementara itu, anggota komunitas adalah sumber daya

²⁵ Transkrip hasil wawancara (April-Oktober, 2013).

²⁶ Sutomo, *Op.cit.*, 100.

²⁷ Ife and Tesoriero, *Op.cit.*, 241.

²⁸ Brokensha and Hodge, *Op.cit.*, 35.

²⁹ Ife and Tesoriero, *Op.cit.*, 250.

³⁰ Mevin Delgado, *Community Social Work Practice in an Urban Context: The Potential of a Capacity-Enhancement Perspective*, Oxford University Press, England, 2000, hlm. 75-107.

utama dalam pengembangan komunitas dan terlibat pada seluruh proses comdev.³¹

Keempat, model dari pengembangan komunitas dilandasi dengan 'keterampilan lokal'. Komunitas di Desa Pasar Banggi melakukan kegiatan comdev melalui cara penggunaan teknologi tepat guna. Penggunaan teknologi dan pengetahuan yang sederhana namun menghasilkan suatu yang baik. Mereka berhasil mewujudkan hutan mangrove dan tanggul tambak yang aman.

Kelima, model pengembangan komunitas melalaui 'proses lokal'. Artinya, proses pengembangan komunitas dalam melakukan kegiatan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove dirancang, dilaksanakan dan dikendalikan oleh komunitas itu sendiri. Selain itu, disebut proses lokal karena comdev tersebut dimulai oleh seseorang dan kemudian dikerjakan secara bersama-sama (gotong-royong). Gotong royong merupakan kegiatan berbasis proses lokal.

Intinya, Comdev berbasis kearifan lokal karena seluruh prosesnya dilakukan oleh komunitas setempat. Model comdev ini dapat berhasil karena mampu meningkatkan kualitas hidup setiap anggota komunitas.

Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal

Komunitas Desa Pasar Banggi merupakan desa dengan hutan mangrove sebagai percontohan konservasi. Hal ini disebabkan karena keberadaan hutan mangrovenya masih dilestarikan sampai sekarang. Semua anggota komunitas telah menyadari bahwa menjaga kelestarian hutan mangrove adalah penting.

Selain gotong royong, warga komunitas secara berkala dan bergantian melakukan

pengawasan terhadap hutan mangrove tersebut. Bila satu pohon mati, mereka segera menggantinya dengan benih bakau yang baru. Pengawasan tersebut juga dilakukan terhadap anggota komunitas luar desa yang mengambil sumber daya alam yang ada di kawasan hutan mangrove dan/atau orang yang dengan sengaja melakukan perusakan.

Demi kelestarian hutan mangrove, mereka menerapkan sanksi bagi para perusak. Dalam klasifikasi ringan, misalnya seseorang mengambil buah mangrove atau mengambil batang kayu yang sudah mati. Sanksinya, mereka diberi peringatan untuk tidak mengulangi lagi dengan pernyataan resmi baik secara lisan maupun surat resmi. Jika sanksi tersebut dilanggar, maka akan diproses secara hukum yakni dilaporkan ke polisi sebagai tindakan pencurian dan perusakan.

Bila terjadi pelanggaran berat, seperti menebang pohon mangrove, maka pelanggarnya diberi sanksi dengan prinsip *win-win solution*. Misalnya, seorang memotong satu pohon mangrove, dia diberi sanksi dengan kewajiban menanam 10 (sepuluh) pohon sebagai penggantinya; atau apabila perusakan yang dilakukan seluas 1 meter kawasan hutan mangrove, mereka diberi sanksi harus menanam kembali seluas 3 meter atau 3 kali luas tanaman mangrove yang dirusak.

Dengan kesadaran tinggi, sanksi-sanksi sosial itu ternyata efektif dibandingkan dengan memberikan sanksi hukum langsung. Hukuman denda atau kurungan berdasarkan hukum positif tidak diberlakukan. Anggota komunitas lebih mendasarkan pada solusi berdasarkan kearifan lokal dibandingkan penggunaan hukum positif. Begitulah *win-win solution* diberlakukan.

³¹ Mark S. Homan, *Promoting Community Change*, Third Edition, Thomson, Australia, 2004, hlm. 54-55.

Namun demikian, aset lingkungan yang berupa hutan mangrove di wilayah desa tersebut dirasa belum memiliki tameng hukum adat yang kuat. Warga masyarakat masih sangat khawatir dengan kelestariannya terutama bila kesadaran anggota sudah banyak berubah karena pergantian generasi. Bisa jadi, pada generasi berikutnya tidak menganggap konservasi hutan mangrove adalah suatu yang penting. Dengan demikian, pada gilirannya hutan mangrove akan punah dan hanya tinggal kenangan.

Fungsi Hutan Mangrove Bagi Kehidupan Komunitas

Secara ekonomi dan sosial, hutan mangrove merupakan sumber daya alam dan menjadi aset komunitas.³² Ia juga menjadi modal sosial komunitas yang dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung kepada

anggota komunitas di sekitarnya. Hutan mangrove dan sumber daya alam lainnya merupakan aset komunitas atau sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Sumber daya ini secara terus menerus memberikan keuntungan berupa jenis pekerjaan bagi anggota komunitas.

Pulih dan lestariannya hutan mangrove dapat melindungi aset komunitas berupa tambak. Pemilik dan buruh tambak dapat melakukan budidaya tanpa rasa khawatir akan gelombang air laut menerpa tambaknya. Kunjungan komunitas peduli mangrove untuk studi banding atau wisata juga merupakan peluang ekonomi anggota komunitas. Matrik di bawah ini menggambarkan secara jelas fungsi hutan mangrove bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1. Fungsi hutan mangrove bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat

INPUT	KEGIATAN	OUTPUT	HASIL SEMENTARA	HASIL AKHIR
Pulihnya sumber daya alam (hutan mangrove)	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Diversifikasi pekerjaan • Pelibatan tenaga kerja wanita • Lestarinya SDA sebagai aset komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah penghasilan anggota keluarga 	Peningkatan kesejahteraan warga komunitas
Terlindunginya tanggul tambak dari abrasi dan masuknya air laut ke tambak	Terwujudnya budidaya bandeng, udang dan pembuatan garam rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan sumberdaya sebagai bahan pangan olahan dan dijual • Pembuatan makanan dan minuman dari buah mangrove • Pembibitan mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya dan tersedianya berbagai jenis pekerjaan bagi anggota komunitas baik laki-laki dan perempuan 	Berkurangnya migrasi
Tersedianya biota laut (udang, ikan dan kepiting) di sekitar hutan mangrove dan laut sekitarnya	Penangkapan ikan, udang dan kepiting di sekitar hutan mangrove			
Tersedianya buah mangrove	Pemanenan buah mangrove			

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapangan 2013

³² Isbdandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*, Fisip UI Press Jakarta, 2007, hlm. 35-68.

PENUTUP**Kesimpulan**

Kegiatan komunitas melalui pemulihan dan pelestarian hutan mangrove adalah proses pengembangan komunitas (comdev) berbasis kearifan lokal. Hal ini dilakukan untuk melindungi aset-aset komunitas berupa tambak dan sumber daya alam di sekitar hutan mangrove.

Kegiatan pengembangan komunitas bukanlah program pemerintah atau diinisiasi oleh lembaga tertentu, tetapi diinisiasi oleh seorang yang berasal dari komunitas setempat dan kemudian diikuti secara partisipatif seluruh anggota komunitas.

Pengembangan komunitas ini disebut sebagai comdev *bottom-up* karena inisiatif pengembangan komunitas berasal dari bawah. Keberadaan hutan mangrove dan pulihnya berbagai sumber daya alam di sekitarnya dapat memberikan alternatif kegiatan ekonomi bagi komunitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas tersebut.

Kesadaran komunitas di dalam menjaga kelestarian hutan mangrove sangat baik dan kompak. Jika ada perusakan yang dilakukan oleh siapapun dan dari manapun, komunitas mengutamakan proses penyelesaian dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip 'win-win solution'. Prinsip tersebut saling menguntungkan bagi kepentingan konservasi hutan mangrove dan kepentingan seluruh anggota komunitas.

Saran

Model comdev berbasis kearifan lokal dimana seluruh prosesnya dikendalikan oleh komunitas setempat ternyata mendukung upaya pemulihan dan pelestarian hutan mangrove. Dengan demikian, model ini memperkaya strategi dari comdev *bottom-up* yang ada. Selama ini model

bottom-up hanya dimaknai sebagai upaya melibatkan partisipasi anggota komunitas yang rancangan modelnya sebenarnya masih dalam lingkup model comdev *top-down*, karena comdev seperti itu masih diinisiasi oleh pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adi, Isbdandi Rukminto, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*, Fisip UI Press, Jakarta: 2007.
- Brokensha, David and Peter Hodge, *Community Development, an Interpretation*, Chandler Publishing Company, Chicago, 1969.
- Delgado, Melvin, *Community Social Work Practice in an Urban Context*, Oxford University Press, New York, 2000.
- Homan, Mark S., *Promoting Community Change*, Thomson, Australia, 2004.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, *Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Kenny, Susan, *Developing Communities, For The Future*. Nelson Thomson, Australia, 2007.
- Midgley, James, *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, Sage Publication, London, 1995.
- Midgley, James and Amy Conley, *Social Work and Social Development, Theories and Skills for Development Social Work*, Oxford University Press, England, 2010.
- Rubin, Herbert J. And Irene S. Rubin, *Community Organizing and Development*. Allyn and Bacon, Boston, 2001.
- Saegert, Susan; J. Phillip Thomson; Mark R Warren ed., *Social Capital and Poor Communities*, Russell Sage Foundation, New York, 2001.
- Schneider, Jo Anne, *Social Capital and Welfare Reform, Organization, Congregation, and Communities*, Columbia University Press, New York, 2006.

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010.

Artikel

Erfteimeijer, P.L.A. and A. Bualuang. "Participation of Local Communities in Mangrove Forest, Rehabilitation in Pattani Bay, Thailand. Learning from Successes and Fail-ures", *Proceeding of a Workshop Held at the 2nd International Conference on Wetlands and Development*, (Dakar, Sinegal, November, 1998), <https://portals.iucn.org/lib/rary/efiles/edocs/2002-012.pdf>.

Fikriani, Mutia dan Mussadun. "Evaluasi Program Rehabilitasi Masyarakat di Pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayang Kabupaten Demak", *Jurnal Ruang 2*, No. 1 Tahun 2014, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/4415>.

Gawler, Meg. "What Are Best Practices? Lessons in Participatory Management of Inland and Coastal Wetlands", *Proceeding of a Workshop Held at the 2nd International Conference on Wetlands and Development* (Dakar, Sinegal, November, 1998), <https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2002-012.pdf>.

Khadka, Chiranjeewee and Harald Vacik. "Comparing a Top-down and Bottom-up Ap-proach in The Identification of Criteria for Sustainable Community Forerst Man-agement in Nepal", *Forestry. An International Journal of Forest Research* 85, No. 1 Tahun 2012, <http://forestry.oxfordjournals.org/content/85/1/145.short>.

Korten, David C. "Third Generation NGO Strategies: A Key to People-Centered Devel-opment", *World Development Pergamon Journals* 15 (supplement, 1987), <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X87901537>.

Mahardi, Weka. "Lesson Learned from The Programme 'Let's Plant Mangrove' Case Study from Villages in Banten and Central Java Province Indonesia, In Sharing Lesson on Mangrove Restoration. *Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium* (Mamallapuram, India 30-31 Agustus, 2012), <http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Call-for-Action-and-Proceedings-from-2012-Colloquium-Mamallapuram-India.pdf>.

Nasrul, Wedi. "Peran Lembaga Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 Juni 2013, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id:8080/handle/123456789/3499>.

Olesu-Adjei, Isaac. "Community Participation in Coastal Resources Management in Ghana", *Proceeding of a Workshop Held at the 2nd International Conference on Wetlands and Development* (Dakar, Sinegal, November, 1998), 107-110, <https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2002-012.pdf>.

Setyawan, Ahmad Dwi dan Kusumo Winarno. "Permasalahan Konservasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah", *Jurnal Biodiversitas* 7, no. 2 (2006) 59-163, <http://eprints.uns.ac.id/845/>.

Shah, Igtidar Ali and Neetz Baparikor. "Participatory Approach to Development in Paki-stan", *Journal of Economic and Social Studies* 2, no. 1 (Spring 2012), 111-141, <http://eprints.ibu.edu.ba/1071/>.

- Sudtongkong, Chanyut and Edward L. Webb. "Outcomes of State vs. Community Based Mangrove Management in Southern Thailand", *Ecology and Society Journal* 13, No. 2 Tahun 2008, 27-50. <http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art27>.
- Sukardjo, Sukristjoro. "Indonesian Mangrove: Critical Challenges and Strategies for Their Sustainable Management After the 2004 Indian Ocean tsunami", In *Sharing Lesson on Mangrove Restoration. Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium (Mamallapuram, India, 30-31 Agustus, 2012)*, 39-50, <http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Call-for-Action-and-Proceedings-from-2012-Colloquium-Mamallapuram-India.pdf>.
- Triyono dan Ahmad Arif. "Modal sosial sebagai Mainstream Pengembangan Masyarakat Pesisir: Sebuah Pendekatan Sosial Untuk Mendukung Pembangunan Lokal Tipologi Masyarakat Pesisir", *Prosiding Lokakarya Nasional Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Potensi Konflik antar Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 30 Agustus, 2003.
- Winarno, Kusuma dan dan Ahmad Dwi Setyawan. "Penyudetan Sungai Citanduy, Buah Simalakama Konservasi Ekosistem Mangrove Segara Anakan", *Jurnal Biodiversitas* 4, No. 1 Tahun 2006, <http://eprints.uns.ac.id/845/>.
- Winarto, Yunita T. dan Ezra M. Choesin. "Pengayaan Pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial: Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Kemitraan", *Jurnal Antropologi Indonesia* 64 (2001), <http://anthropology.fisip.ui.ac.id/httpdocs/jurnal/2001/64/full/09ytw64.pdf>.
- Wood, Andrian, Apework Hailu, Patrick Abbot, and Alan Dixon, "Sustainable Management of Wetlands in Ethiopia: Local Knowledge versus Government Policy", *Proceeding of a Workshop Held at the 2nd International Conference on Wetlands and Development (Dakar, Sinegal, November, 1998)* <https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2002-012.pdf>.
- Vyes, Pradeep and K Sengupta. "Mangrove Conservation and Restoration in Indian Sunderbans", In *Sharing Lesson on Mangrove Restoration. Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium (Mamallapuram, India, 30-31 Agustus 2012)*, <http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Call-for-Action-and-Proceedings-from-2012-Colloquium-Mamallapuram-India.pdf>.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL BINA HUKUM LINGKUNGAN

BENTUK TULISAN

JURNAL BINA HUKUM LINGKUNGAN menerima naskah berupa artikel hukum, hasil penelitian ilmiah dibidang hukum, serta analisis putusan pengadilan dan studi kasus.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, dalam kertas ukuran A4 dengan jarak tulisan dalam satu paragraf sejauh 1.5 spasi, menggunakan huruf Book Antiqua, ukuran 11.
2. Panjang naskah maksimal 20 (dua puluh) halaman, dan minimal 10 (sepuluh) halaman. Awal paragraf diketik menjorok sebanyak 5 ketukan.
3. Naskah terdiri atas judul bahasa Indonesia dan judul bahasa Inggris dibawah judul dicantumkan nama penulis lengkap tanpa gelar. Abstrak ditulis dalam Indonesia dan bahasa Inggris dengan 3 buah kata kunci. Adapun sistematika penulisan terdiri dari Pendahuluan, Hasil dan Pembahasan, Penutup yang berisikan simpulan dan saran (bila ada), serta daftar pustaka.

PENYERAHAN NASKAH

1. Naskah yang diserahkan ke redaksi JURNAL BINA HUKUM LINGKUNGAN harus belum dan tidak pernah dimuat di jurnal atau media publikasi lainnya.
2. Singkatan, ketika pertama kali muncul dalam teks harus diikuti dengan kepanjangannya. Untuk proses editing, naskah final (setelah diperbaiki sesuai dengan saran dari dewan editor) harus disertai dengan hasil print out disertai soft copy.
3. Naskah dikirimkan ke redaksi JURNAL BINA HUKUM LINGKUNGAN dengan alamat Jl. Imam Bonjol No.21 - Bandung 40132. Telp. 082115326539, atau dapat juga dikirim secara online melalui *Open Journal System* (OJS) dengan alamat website: www.bhl-jurnal.or.id beserta *email*: redaksi.bhl@gmail.com.
4. Naskah yang formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan JURNAL BINA HUKUM LINGKUNGAN, akan ditolak dan editor tidak berkewajiban mengembalikan naskah yang bersangkutan.

CATATAN KAKI

1. Catatan kaki di mulai dengan tanda * untuk memuat keterangan artikel atau identitas dari penulis kemudian di lanjutkan dengan angka 1 dan seterusnya.
2. Catatan kaki harus dicantumkan dengan singkat dan jelas. Dapat memuat keterangan dan penjabaran lebih lanjut dari naskah, namun diutamakan hanya memuat nama penulis buku rujukan (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota, dan tahun terbitan, serta halaman yang cukup ditulis dengan singkatan hlm.
3. Catatan kaki yang lebih dari 1 baris, maka untuk baris pertama dibuat menjorok sebanyak 5 ketukan dibandingkan baris kedua dan seterusnya tanpa ada jarak spasi, menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 9.

JUDUL

1. Judul dibuat singkat, namun cukup untuk menggambarkan isi (substansi) naskah secara keseluruhan (informatif dan deskriptif).
2. Judul secara keseluruhan ditulis dengan huruf kapital. Untuk kata asing dicetak miring.

ABSTRAK

1. Abstrak merupakan ringkasan pokok bahasan lengkap dari keseluruhan naskah tanpa harus memberikan keterangan terperinci.
2. Abstrak terdiri atas 200 kata, dengan 3 kata kunci.
3. Dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Kata kunci adalah kata-kata lepas/tunggal atau majemuk yang mencerminkan konsep penting dalam tulisan, dan kata tersebut paling sering ditulis secara berulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Harus memuat secara keseluruhan pustaka yang turut dikutip dalam naskah.
2. Disusun menurut abjad pengarang dengan urutan: nama yang tidak dibalik tanpa gelar, judul buku yang dicetak miring, nama penerbit buku, kota, dan tahun terbitan.
3. Apabila daftar pustaka diketik lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan seterusnya dibuat menjorok ke dalam 1 cm.
4. Daftar pustaka disusun secara sistematis dan diklasifikasikan menurut jenisnya, berturut-turut buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain (Koran, majalah, artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, termasuk data yang diperoleh dari website).
5. Untuk daftar pustaka berupa peraturan perundang-undangan disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang sejenis, maka susunan disesuaikan menurut tahun yang terlebih dahulu diundangkannya peraturan tersebut.
6. Daftar pustaka dari Koran dan majalah, harus menyebutkan nama Koran, majalah, termasuk hari serta tanggal terbitnya. Untuk artikel ilmiah turut disebutkan pula nama penulis, nama jurnal, nama penerbit, bulan, dan tahun edisi jurnal.
7. Data yang diperoleh dari website dalam daftar pustaka harus menyebutkan alamat website, tanggal, dan jam mengakses data.

**FORM LANGGANAN
JURNAL BINA HUKUM LINGKUNGAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap :.....

Alamat rumah/ :.....

Kantor :.....Kode Pos :.....

Telp :.....Fax :.....

HP :.....Email :.....

Mulai berlangganan terbitan edisi:..... s.d.

Saya bermaksud untuk berlangganan Jurnal Bina Hukum Lingkungan dan akan memberikan konfirmasi secara langsung kepada:

SEKRETARIAT REDAKSI

BINA HUKUM LINGKUNGAN

Jl. Imam Bonjol No.21 - Bandung 40132. Telp. 082115326539

Email: redaksi.bhl@gmail.com

Bandung,

Hormat saya

(.....)

